

JURNAL

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN DI INDONESIA



Diajukan oleh :

VICTOR OSMOND TARIGAN

N P M : 120510930
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN DI INDONESIA



Diajukan oleh :

VICTOR OSMOND TARIGAN

N P M : 120510930
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 26 Juli 2016

Dr. AL. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M.

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN DI INDONESIA

Victor Osmond Tarigan,

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

email: victort17@ymail.com

ABSTRACT

Judicial practice in Indonesia, many pretrial ruling that is considered detrimental to the party. Those who feel aggrieved against the decision of the pretrial, make legal effort to examine the verdict. The parties have different arguments to legal effort. One reason for the rule of law on pre-trial has not been set clearly, decisively and systematically in a single statute. Based on pretrial practices in Indonesia, then the real question (1) How is the legal arguments in the practice of filing legal effort against the decision of pretrial in Indonesia? (2) How appropriate legal formulations to achieve legal protection against the decision of the pretrial? This study is a normative legal research, using library research and interviews. The results of this research is a translation of the arguments of the parties to propose remedies and formulations right in realizing legal protection against the decision of the pretrial.

Keyword: Legal effort, Decision, Pretrial.

1. PENDAHULUAN

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil. Kebenaran materil merupakan kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan¹.

Putusan praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada intinya bersifat final, yang

berarti tidak bisa dilakukan upaya hukum banding sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) KUHP, sedangkan pada Pasal 83 ayat (2) KUHP terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahny penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan, namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-IX/2011 Pasal 83 ayat (2) KUHP dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang tidak mempersamakan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastin hukum yang adil, sehingga dengan demikian semua putusan praperadilan tidak bisa dimintakan upaya hukum banding.

¹ Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Garafika, Jakarta, hlm 7-8.

Realitanya banyak putusan praperadilan yang dipandang kontroversial yang bertentangan dengan tujuan hukum acara pidana, ketika kebenaran materil ingin diungkap dalam suatu perkara hukum tetapi dihentikan oleh putusan praperadilan, hal ini menjadi masalah karena dalam KUHAP tidak terdapat aturan lagi tentang upaya hukum terhadap putusan praperadilan. sekalipun dalam praktek ada ketentuan yang bisa dijadikan acuan seperti Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2011 tentang perkara yang tidak memenuhi syarat kasasi dan peninjauan kembali. aturan - aturan tersebut belum bisa menyelesaikan masalah dan masih bisa diperdebatkan terutama SEMA apakah bisa dijadikan dasar hukum karena tidak terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, sedangkan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung juga dipandang masih menimbulkan pro dan kontra apakah bisa dijadikan dasar hukum dalam mengajukan upaya hukum terhadap putusan praperadilan, sehingga kedua aturan tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam hukum. Beberapa contoh kasus yang mengajukan upaya hukum terhadap putusan praperadilan, seperti contoh kasus wartawan Udin yang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, kasus Ginandjar Kartasasmita yang mengajukan upaya hukum kasasi, serta kasus Hadi Poernomo yang diajukan peninjauan kembali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banding yang diajukan dalam kasus Udin yang merupakan wartawan surat kabar BERNAS

karena menurut salah satu kuasa hukum putusan ini menjadi preseden yang tidak baik bagi proses penegakan hukum, khusus permohonan kepastian hukum dalam kasus Udin dan kasus serupa. Oleh karena itu kami menilai putusan ini tak ubahnya pengadilan tidak lebih sebagai corong undang-undang². Kasus Ginandjar Kartasasmita yang dilakukan upaya hukum kasasi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung karena mempertimbangkan alasan dari pemohon praperadilan bahwa dalam KUHAP tidak diatur secara tegas dan jelas permohonan kasasi terhadap putusan praperadilan tidak diperbolehkan dan pendapat Mahkamah Agung yang membenarkan alasan permohonan tersebut karena menurut Pasal 83 dan Pasal 244 KUHAP³. Kasus peninjauan kembali (PK) terhadap putusan praperadilan Hadi Poernomo juga masih menimbulkan perdebatan. Sah atau tidaknya pengajuan PK berulang kali dipermasalahkan Hadi Poernomo selaku termohon dalam sidang PK ini. Menanggapi hal tersebut, tim biro hukum KPK berpendapat dalam SEMA telah diatur ketentuan yang menyatakan bahwa putusan praperadilan masih bisa dilakukan PK, sejauh putusan hakim dinilai bertentangan⁴.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang berfokus pada data sekunder pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa pendukung bahan

² <http://daerah.sindonews.com/22/pn-sleman-tolakpraperadilan-kasus-udin>, diakses 1 Maret 2016

³ http://pt-palembang.go.id/images/yurisprudensi/35_K_PID_2002.pdf, diakses 1 Maret 2016

⁴ <http://nasional.sindonews.com/read/1045381/13/kpk-optimis-ma-terima-pk-putusan-praperadilan-hadi-poernomo-1442387778>, diakses 1 Maret 2016.

hukum primer. Metode pengumpulan data sekunder dalam penulisan ini, penulis menggunakan cara studi kepustakaan dengan mempelajari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta dengan teknik wawancara terstruktur dengan membuat daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara dan menanyakan secara langsung berdasarkan pedoman wawancara kepada narasumber. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini metode analisis kualitatif Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah, melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif. Data yang diperoleh dari sumber dikumpulkan menjadi satu, selanjutnya disusun dan dianalisis kemudian data diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Hukum

1. Pengertian dan Tujuan Upaya Hukum

Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak, oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan⁵.

Pengertian upaya hukum menurut Pasal 1 Butir 12 KUHAP adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan⁶. Tujuan dari upaya hukum itu sendiri adalah:

- a. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pengadilan yang memutus sebelumnya
- b. Mencapai kesatuan dalam peradilan
- c. Memberi jaminan pada terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan berdasarkan pada fakta dan hukum secara benar.

Adanya upaya hukum merupakan jaminan baik bagi terdakwa, para pihak dan masyarakat bahwa peradilan sesuai menurut fakta, hukum dan sejauh mungkin seragam. Upaya hukum sendiri terdiri dari dua, yang pertama upaya hukum biasa dan yang kedua upaya hukum luar biasa. Aturan mengenai upaya hukum biasa terdapat dalam Bab XVII KUHAP yang terdiri dari pemeriksaan banding (*beroep*) dan pemeriksaan kasasi (*cassatie*), sedangkan aturan mengenai upaya hukum luar biasa terdapat dalam Bab XVIII KUHAP yang terdiri dari pemeriksaan kasasi demi kepentingan

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta hlm 242-243.

⁶<http://pustaka.hukum.blogspot.co.id/read/2015/03/upaya-hukum-dalam-hukum-acara-perdata>., diakses 1 Maret 2016.

hukum (*cassatie in het belang van de wet*) dan peninjauan kembali (*herziening*) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Upaya Hukum Biasa

KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Pemeriksaan dalam upaya hukum biasa dilakukan terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Upaya hukum biasa terdiri dari dua, pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan tingkat kasasi.

a. Pemeriksaan Tingkat Banding (*beroep*)

Pengertian upaya hukum banding adalah upaya yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan, supaya putusan peradilan tingkat pertama diperiksa lagi dalam peradilan tingkat banding, secara yuridis formal undang-undang memberi upaya kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan putusan peradilan tingkat pertama di peradilan tingkat banding⁷. KUHAP mengatur upaya hukum banding dalam Pasal 67 yang berbunyi “*terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat*. Pihak yang dapat

mengajukan banding adalah terdakwa atau penasehat hukum dan penuntut umum. Tujuan dari upaya hukum banding adalah untuk memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama, mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan, dan pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum⁸. Pemeriksaan banding sebenarnya merupakan suatu penilaian baru (*judicium novum*), sehingga dapat diajukan saksi-saksi baru, ahli-ahli, dan surat-surat baru⁹. Akibat dari permintaan banding adalah putusan menjadi mentah kembali sehingga segala sesuatu beralih menjadi tanggung jawab yuridis pengadilan tingkat banding, dan putusan yang dibanding tidak mempunyai daya eksekusi.

b. Pemeriksaan Tingkat Kasasi (*cassatie*)

Kasasi merupakan kewenangan pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap penerapan hukum (putusan yang bertentangan dengan hukum) dalam perkara yang diputus oleh semua pengadilan tingkat terakhir selain Mahkamah Agung. Tujuan dari kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum¹⁰. Upaya hukum kasasi merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa maupun

⁷ Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 429.

⁸ *Ibid*, hlm 430-431.

⁹ Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 292.

¹⁰ Andi Hamzah, 2008, *Hukum acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 298.

kepada penuntut umum, tergantung kepada mereka mau mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung¹¹.

Putusan yang dapat diajukan permohonan kasasi adalah semua putusan perkara pidana yang dapat diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung sendiri dan putusan bebas (Pasal 244 KUHAP). Permohonan kasasi ditolak jika¹²:

- a. Putusan yang dimintakan kasasi adalah putusan bebas
- b. Melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya, yaitu empat belas (14) hari sesudah putusan disampaikan kepada terdakwa (Pasal 254 KUHAP)
- c. Sudah ada keputusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut. Permohonan kasasi hanya bisa diajukan sekali.
- d. Pemohon tidak mengajukan memori kasasi, atau tidak memberitahukan alasan kasasi kepada panitera, jika pemohon tidak memberitahukan alasan kasasi kepada panitera, jika pemohon tidak memahami hukum, atau pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi yaitu empat belas (14) hari sesudah

mengajukan permohonan kasasi.

- e. Tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang alasan kasasi.

3. Upaya Hukum Luar Biasa

Pemeriksaan dalam upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Upaya hukum luar biasa terdiri dari pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan pemeriksaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

a. Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van de wet*)

Kasasi demi kepentingan hukum merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung (Pasal 259 KUHAP). Tujuan dari pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum adalah agar hukum diterapkan secara benar, sehingga ada kesatuan dalam peradilan¹³. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Pihak yang dapat melakukan permohonan adalah Jaksa Agung.

¹¹ Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 537.

¹² Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 299-300.

¹³ HMA. Kuffal, 2008, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm 393.

**b. Pemeriksaan Peninjauan Kembali
(herziening)**

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 263 (1) KUHAP). Peninjauan kembali merupakan hak terpidana atau ahli warisnya, namun prakteknya dalam beberapa kasus selain terpidana atau ahli warisnya, jaksa dapat mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak hanya memeriksa penerapan hukumnya (*judex juris*) tetapi juga dapat memeriksa fakta dan bukti (*judex factie*) dalam suatu perkara yang diajukan. Dasar dari permintaan pemeriksaan peninjauan kembali adalah¹⁴:

- 1) Apabila terdapat 'keadaan baru' yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan
- 2) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan

putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain

- 3) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

B. Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan dan Praperadilan

Putusan merupakan produk pengadilan yang dibuat oleh hakim. Produk pengadilan yang dibuat oleh hakim dapat berupa penetapan dan putusan. Penetapan tidak terkait dengan penyelesaian perkara, sedangkan putusan terkait dalam penyelesaian suatu perkara. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 11 KUHAP).

Putusan praperadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang praperadilan terbuka, yang dapat berupa menerima permohonan pemohon secara keseluruhan, menolak permohonan pemohon secara keseluruhan, dan menerima permohonan pemohon untuk sebagian.

2. Jenis Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan terdiri dari putusan yang bersifat formil (putusan sela) dan putusan yang bersifat

¹⁴ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 305-306.

materil/putusan akhir (*eind vonnis*).
Putusan yang bersifat formil terdiri dari:

- a. putusan yang berisi tidak berwenangnya pengadilan (*onbevoedde verklaring*)
- b. putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*)
- c. putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*)
- d. putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara karena ada perselisihan (*prajudisiel*).

Putusan bersifat materil (*eind vonnis*) terdiri dari¹⁵:

- a. Putusan Bebas (*vrijspreek*),
Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Terdakwa diputus bebas apabila dalam pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)
Putusan lepas dari segala tuntutan hukum apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Putusan pemidanaan (*veroordeling*).

Putusan pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan

ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana

C. Gambaran Umum Praperadilan

1. Sejarah Praperadilan

Sejarah lahirnya praperadilan tidak bisa dilepaskan dari sejarah lahirnya KUHAP itu sendiri. Munculnya praperadilan agaknya bisa disebut sebagai satu terobosan yang bersifat kebetulan. Bermula dari diajukannya Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh pemerintah pada tahun 1979 yang ternyata mendapat reaksi penolakan dari berbagai kalangan, terutama dari pers, akademisi, praktisi hukum, dan lain sebagainya. Penolakan tersebut lebih disebabkan karena materi muatannya dipandang lebih buruk dibandingkan *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, terutama dalam melindungi tersangka, terdakwa, dan orientasinya pun masih pada pembelaan terhadap posisi kekuasaan, yaitu penegak hukum. Dalam situasi seperti itulah, menurut Adnan Buyung kemudian muncul Komite Aksi Pembela Pancasila di dalam KUHAP. Draf versi pemerintah yang diajukan oleh Menteri Kehakiman pada waktu itu Bapak Mudjono, S.H., tidak mengajukan lembaga praperadilan, tetapi mengajukan model hakim pemeriksa pendahuluan yang sebenarnya sudah pernah diusulkan oleh Prof. Oemar Senoadji dalam draf tahun 1974¹⁶, tidak ada catatan resmi mengenai siapa sebenarnya penggagas awal praperadilan di dalam KUHAP. Hal tersebut diyakini bahwa praperadilan adalah modifikasi dari usulan hakim pemeriksa pendahuluan yang pernah diintrodusir oleh Menteri Kehakiman sebelumnya pada tahun 1974¹⁷, namun ternyata berdasarkan penelitian tersebutlah bahwa penggagasnya sebenarnya adalah

¹⁵ Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 347-354.

¹⁶Loebby Loqman, 1987, *Praperadilan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, hlm.29-31.

¹⁷*Ibid*, hlm.40.

Adnan Buyung Nasution. Menurut pengakuan narasumber, Mudjono menerima usulan agar model hakim pemeriksa pendahuluan diganti saja dan menyetujui usulan Adnan Buyung merumuskan secara tertulis dibantu oleh beberapa ahli yang antara adalah Gregory Churchill, seorang Pengacara Amerika yang sedang mengajar secara volunteer di Universitas Indonesia.¹⁸

2. Pengertian dan Tujuan Praperadilan

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP mengenai:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan¹⁹.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi NO: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memperluas obyek praperadilan menjadi sah atau tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan.

Tujuan dari lembaga praperadilan dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (penyelidik/penyidik maupun penuntut umum)²⁰, sebagai upaya koreksi

terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang.

C. Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan

1. Argumentasi hukum dalam praktik pengajuan upaya hukum terhadap putusan praperadilan di Indonesia

a. Argumentasi Upaya Hukum Secara Umum Terhadap Putusan Praperadilan

Setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum yang bertujuan sebagai upaya memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak, oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan, setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Salah satu putusan yang tidak luput dari kekeliruan adalah putusan perkara praperadilan.

Seringkali dalam kasus praperadilan, putusan praperadilan dianggap merugikan salah satu pihak, sehingga perlu dibuka upaya hukum terhadap putusan praperadilan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Dr. Arief Setiawan, S.H, M.H. yang mengatakan “jika putusan praperadilan pada tingkat pertama dianggap

¹⁸Claudia Okta Rini, 2011, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Atas Alasan Penghentian Penyidikan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP (Studi Kasus Penerimaan Permintaan Banding Dalam Kasus Lam Yenny Lamengan VS*

Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya, Universitas Indonesia, hlm18.

¹⁹ Ratna Nurul Afiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 74-75

²⁰ S. Tanusubroto, 1983, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.80.

tidak menimbulkan rasa keadilan bagi para pihak maka perlu dibuka upaya hukum”²¹. Penulis sependapat dengan hal tersebut karena salah satu tujuan dari hukum adalah mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam praktik di Indonesia para pihak melakukan berbagai macam upaya hukum untuk menguji putusan praperadilan yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak mempunyai argumentasi hukum yang berbeda-beda, baik dari pihak pemohon ataupun pihak termohon.

b. Argumentasi Upaya Hukum Banding

1) Putusan No: 01/PID.PRALAN/2007/PT. SBY (Banding Diterima)

Para Pihak

Lam Yenny Lamengan sebagai pihak pemohon melawan Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya sebagai pihak termohon. Materi yang diajukan dalam praperadilan mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan.

Kasus Posisi

Kasus ini berawal permohonan praperadilan oleh Lam Yenny Lamengan sebagai pemohon praperadilan mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan yang dilakukan Kepolisian Kota besar Surabaya ke Pengadilan Negeri Surabaya. Permohonan praperadilan tersebut diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan No:

07/Pra.Per/2006/PN. Sby tanggal 25 September 2006. Dalam amar putusannya hakim menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya adalah sah. Pihak pemohon merasa tidak puas dengan putusan praperadilan tersebut, sehingga mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 10 November 2006. Pengadilan Tinggi Surabaya memutus perkara tersebut dengan Putusan No: 01/PID.PRALAN/2007/PT.SBY. Amar putusan hakim menyatakan mengadili, menerima permohonan banding dari pemohon dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 September 2006 Putusan No: 07/Pra.Per/2006/PN. serta mengadili sendiri menyatakan menerima permohonan banding pemohon praperadilan (pemohon banding), menyatakan penghentian yang dilakukan termohon banding adalah tidak sah menyatakan penghentian penyidikan terhadap kasus penipuan yang dilakukan dr. Susanti Lengkong wajib dilanjutkan dan menghukum termohon banding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar nihil.

Analisis

Permasalahan yang timbul dalam kasus ini adalah diterimanya

²¹ Hasil Wawancara dengan bapak DR. Arief Setiawan, S.H., M.H. pada tanggal 15 April 2016, pukul 10.00, di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

permohonan banding Lam Yenny Lamengan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya mengenai putusan praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya yang menetapkan sahnya penghentian penyidikan. Untuk dapat menilai permintaan banding tersebut sudah tepat atau belum maka terlebih dahulu harus mengetahui apakah terhadap putusan praperadilan dapat dilakukan upaya hukum. Upaya hukum mengenai praperadilan diatur dalam Pasal 83 KUHAP, yang berbunyi:

- (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 (sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan), Pasal 80 (sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan), dan Pasal 81 (ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan) tidak dapat dimintakan banding
- (2) Dikecualikan dan ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 KUHAP tersebut menunjukan bahwa terhadap semua putusan Praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kecuali terhadap putusan praperadilan mengenai tidak sahnya penghentian

penyidikan dan penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi. Dalam kasus ini hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding pemohon karena berpendapat tidak ada larangan dengan tegas terhadap putusan praperadilan mengenai sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan untuk diajukan banding.

Penulis menilai dari sisi normatif, argumentasi hakim tersebut tidak tepat karena Pasal 83 KUHAP sudah secara tegas mengatur larangan upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan. Sedangkan terhadap pendapat hakim bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP apabila yang dapat dimintakan banding hanyalah terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan adalah suatu ketentuan hukum yang tidak adil, dimana Penyidik dan Penuntut Umum dapat mengajukan banding terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, sedangkan sebaliknya pelapor tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan praperadilan yang menetapkan sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Penulis menilai dari sisi keadilan, pendapat hakim tersebut sudah tepat karena dengan adanya pengecualian dalam Pasal 82 ayat (2) KUHAP menimbulkan ketidakadilan bagi pihak korban atau pelapor. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak hanya sebagai corong Undang-Undang, yang hanya menekankan pada

keadilan prosedur tetapi juga menekankan keadilan substansif sehingga mencerminkan ciri keadilan substansif yang tidak hanya menekankan pada keadilan prosedur saja, oleh karena itu putusan praperadilan mengenai sahnyanya penghentian penyidikan dan penuntutan dapat diajukan permintaan banding.

2) **Putusan No: 01/Pra/PID/2014/PTY (Banding Ditolak)**

Para Pihak

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Yogyakarta sebagai pihak pemohon melawan Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai pihak termohon. Materi praperadilan yang diajukan permohonan mengenai tidak sahnyanya penghentian penyidikan.

Kasus Posisi

Kasus ini berawal dari pihak pemohon praperadilan PWI Yogyakarta mengajukan permohonan praperadilan tidak sahnyanya penghentian penyidikan oleh Kepolisian DIY ke Pengadilan Negeri Sleman. Pihak pemohon menyatakan bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan Kepolisian DIY dalam kasus wartawan Udin tidak sah secara hukum. Pengadilan Negeri Sleman melalui Putusannya Nomor: 05/Pid.Pra/2013/PN.Slmm menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima. Pihak pemohon tidak puas dengan putusan tersebut sehingga mengajukan banding ke Pengadilan

Tinggi Yogyakarta. Permohonan banding tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 01/Pra/PID/2014/PTY yang dalam amar putusannya menolak permohonan banding pihak pemohon (JPW).

Analisis

Permasalahan yang timbul dalam kasus ini adalah tidak diterimanya permohonan banding kasus praperadilan PWI Yogyakarta oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang dinilai tidak adil oleh pemohon PWI Yogyakarta. Untuk dapat menilai permintaan banding tersebut sudah tepat atau belum maka terlebih dahulu harus mengetahui apakah terhadap putusan praperadilan dapat dilakukan upaya hukum. Upaya hukum mengenai praperadilan diatur dalam Pasal 83 KUHAP, yang berbunyi:

- (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 (sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan), Pasal 80 (sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan), dan Pasal 81 (ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnyanya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnyanya penghentian penyidikan atau penuntutan) tidak dapat dimintakan banding
- (2) Dikecualikan dan ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnyanya penghentian penyidikan dan penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke

Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 KUHAP tersebut menunjukan bahwa terhadap semua putusan Praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kecuali terhadap putusan praperadilan mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi. Akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 yang menganulir Pasal 83 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam kasus ini hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak menerima permohonan banding pemohon karena berpendapat, Bahwa berdasarkan Pasal 83 KUHAP putusan praperadilan tidak dapat dimintakan permohonan banding. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor: 65/PUU-XI/2011 yang menganulir Pasal 83 ayat (2) KUHAP tentang putusan praperadilan yang dapat diajukan banding tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa putusan praperadilan adalah putusan akhir dan tidak ada upaya hukum lagi, maka permohonan banding tidak dapat diterima. Dasar hukum yang digunakan hakim adalah Pasal 83 KUHAP, dalam

ayat (1) menyatakan terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Walaupun pada ayat (2) dikecualikan terhadap putusan praperadilan mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi daerah hukum yang bersangkutan. Akan tetapi Pasal 83 (2) tersebut dianulir Putusan MK No:65/PUU-IX/2001 sehingga tidak mengikat secara hukum, oleh karena itu tidak terdapat lagi aturan dalam KUHAP mengenai upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan.

Penulis menilai dari sisi normatif argumentasi hakim tersebut sudah tepat, karena berdasarkan Pasal 83 KUHAP tentang putusan praperadilan yang tidak bisa diajukan upaya hukum banding dan Putusan MK No:65/PUU-XI 2011 yang menganulir Pasal 83 (2) KUHAP sehingga tidak terdapat aturan untuk mengajukan permohonan banding. Dalam hal ini peluang untuk banding tertutup, hakim tidak dapat menerima permohonan banding karena tidak terdapat lagi dasar hukum untuk mengajukan permohonan banding yang telah dianulir Putusan Mahkamah Konstitusi No: 65/PUU-XI 2011.

c. Argumentasi Upaya Hukum Kasasi

1) Putusan No: 35 K/Pid/ 2002 (Kasasi Diterima)

Para Pihak

Jaksa Agung Republik Indonesia cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selaku pemohon kasasi semula termohon

praperadilan, melawan Prof. DR. Ir. Ginandjar Kartasasmita selaku termohon kasasi semula pemohon praperadilan. Materi yang diajukan dalam sidang praperadilan adalah mengenai tidak sahnya penahanan yang dilakukan termohon praperadilan.

Kasus Posisi

Kasus ini berawal Pada tanggal 6 April 2001 pemohon praperadilan (Ginandjar Kartasasmita) yang merupakan seorang purnawirawan, ditahan di rutan Kejaksaan Agung RI oleh termohon praperadilan. Dimana surat perintah penahanan dengan No: Prin-052/F/FJP/04/2001 baru diterbitkan pada tanggal 17 April 2001 dan diberlakukan surut oleh termohon praperadilan dengan menyebutkan bahwa pemohon praperadilan ditahan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 9 April 2001 sampai 28 April 2001. Pemohon praperadilan disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam pembuatan Technical Contract antara Pertamina dengan PT. Utrasindo Petro Gas yang dibuat pada tahun 1992-1993. Pemohon praperadilan pada saat itu masih merupakan prajurit aktif. Merasa bahwa apa yang dilakukan oleh termohon praperadilan tidak sesuai dengan peraturan, maka pemohon praperadilan pun mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan alasan bahwa seharusnya menurut Pasal 21 ayat (3) KUHAP, surat penahanan harus terlebih dahulu dibuat baru dilakukan penahanan, selain itu dikarenakan hal yang disangkakan kepadanya

merupakan kegiatan yang pemohon lakukan ketika saat ia masih aktif sebagai prajurit maka seharusnya kepadanya berlaku hukum acara militer. Melalui Putusan praperadilan tanggal 2 Mei 2001 NO: 07/Pra.Pid/2001/PN.Jaksel menyatakan penahanan yang dilakukan termohon adalah tidak sah. Tidak terima dengan putusan praperadilan tersebut pada tanggal 14 Mei 2001, maka pihak termohon Jaksa Agung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Agung dan membatalkan putusan praperadilan NO: 07/Pra.Pid/2001/PN.Jaksel.

Analisis

Permasalahan yang timbul dalam kasus ini adalah putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan tidak sahnya penahanan yang dilakukan oleh termohon praperadilan Jaksa Agung Republik Indonesia. Merasa tidak adil atas putusan tersebut, pihak termohon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk dapat menilai permintaan kasasi tersebut sudah tepat atau belum maka terlebih dahulu harus mengetahui apakah terhadap putusan praperadilan dapat dilakukan upaya hukum kasasi.

Dalam KUHAP memang tidak diatur secara tegas larangan mengenai kasasi. KUHAP hanya mengatur upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan pada Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Akan tetapi Pasal 83 ayat (2) KUHAP telah dianulir oleh Putusan MK No:

65/PUU-XI/2011 sehingga tidak mengikat secara hukum. Hakim Mahkamah Agung berpendapat kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Termohon Praperadilan tersebut dapat dibenarkan karena menurut Pasal 83 dan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan selain dari pada Mahkamah Agung dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Bahwa meskipun dalam beberapa kasus perkara, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa perkara Praperadilan tidak dapat dikasasi, akan tetapi tidak satupun diantara putusan Praperadilan itu mengenai sah atau tidak sahnya penahanan yang dilakukan Tim Penyidik Koneksitas dalam perkara korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer bersama-sama dengan tersangka yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum seperti dalam kasus ini.

Penulis menilai dari sisi normatif argumentasi hakim Mahkamah Agung sudah tepat karena berdasarkan Pasal 83 KUHAP yang mengatur upaya hukum putusan praperadilan, tidak mengatur secara tegas mengenai sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan tim penyidik koneksitas dan Pasal 244 KUHAP yang mengatur putusan perkara pidana yang dapat diajukan kasasi. Penulis menilai dari sisi keadilan argumentasi hakim Mahkamah Agung sudah tepat karena tidak

hanya menekankan pada keadilan prosedur tetapi juga menekankan keadilan substansif. Hal tersebut terlihat dari argumentasi hakim, meskipun dalam beberapa kasus perkara Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa perkara Praperadilan tidak dapat dikasasi, akan tetapi tidak satupun diantara putusan Praperadilan itu mengenai sah atau tidak sahnya penahanan yang dilakukan Tim Penyidik Koneksitas, dalam perkara korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer bersama-sama dengan tersangka yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum seperti dalam kasus ini.

2) Putusan No: 1846 K/ Pid/ 2012 (Kasasi Ditolak)

Para Pihak

Jasmani bin Rejeb sebagai pihak pemohon kasasi melawan Presiden Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur cq. Kepala Kepolisian Resor Tulungagung sebagai pihak termohon I kasasi dan Presiden Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung sebagai pihak termohon II kasasi. Materi yang diajukan dalam praperadilan adalah ganti kerugian akibat tidak sahnya penangkapan, penahanan dan penuntutan oleh termohon I dan termohon II.

Kasus Posisi

Kasus ini berawal dari permohonan Jasmine bin Rejab sebagai pemohon praperadilan ke Pengadilan Negeri Tulungagung mengenai ganti kerugian. Pengadilan Negeri Tulungagung memutus perkara tersebut dengan Putusan No: 02/ Pid/Prap/2012/ PN.Ta. tanggal 26 Juni 2012. Dalam Amar putusan pengadilan tersebut menyatakan bahwa menolak tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh pemohon. Pihak pemohon tidak puas atas putusan praperadilan tersebut sehingga mengajukan permohonan kasasi dengan akta kasasi Nomor: 08/Akta.Pid/2012/PN.Ta. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tulungagung. Mahkamah Agung memutus perkara tersebut dan menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima.

Analisis

Permasalahan dalam kasus ini adalah ditolaknya permohonan ganti rugi yang diajukan pemohon oleh Pengadilan Negeri Tulungagung. Merasa tidak adil atas putusan tersebut, pihak pemohon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk dapat menilai permintaan kasasi tersebut sudah tepat atau belum maka terlebih dahulu harus mengetahui apakah terhadap putusan praperadilan dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Dalam KUHAP memang tidak diatur secara tegas larangan mengenai kasasi. KUHAP hanya mengatur upaya hukum banding

terhadap putusan praperadilan pada Pasal 83 ayat (2) KUHAP, tetapi Pasal 83 ayat (2) KUHAP telah dianulir oleh Putusan MK No: 65/PUU-XI/2011 sehingga tidak mengikat secara hukum. Akan tetapi Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengatur larangan perkara yang dapat diajukan permohonan kasasi. Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (2) sub a Undang-Undang NO: 5 Tahun 2004, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang NO: 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, permohonan kasasi oleh pemohon Jasmine Bin Rejab tidak dapat diterima.

Penulis Menilai dari sisi normatif argumentasi hakim Mahkamah Agung sudah tepat, berdasarkan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang NO: 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang NO: 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang tersebut sudah secara jelas dan tegas mengatur larangan perkara yang dapat diajukan kasasi. Dalam hal ini peluang untuk melakukan kasasi tertutup, hakim tidak dapat menerima permohonan kasasi, karena terikat dengan dasar hukum Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang NO: 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang NO: 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang mengatur

larangan perkara yang dapat diajukan kasasi.

d. Argumentasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali

1) Memori Peninjauan Kembali Putusan No: 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

Para Pihak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku Pemohon Peninjauan Kembali semula Termohon praperadilan, melawan Hadi Poernomo selaku termohon peninjauan kembali semula pemohon praperadilan. materi yang diajukan dalam praperadilan mengenai tidak sahnya penetapan tersangka dan penyitaan yang dilakukan termohon praperadilan.

Kasus Posisi

Kasus ini berawal dari permohonan Hadi Poernomo sebagai pemohon praperadilan mengenai tidak sahnya penetapan tersangka dan penyitaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus permohonan tersebut dengan putusan No: 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. pada tanggal 26 Mei 2015. Dalam amar putusannya hakim menyatakan, bahwa penetapan tersangka dan penyitaan yang dilakukan oleh termohon (KPK) tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pihak termohon praperadilan (KPK) merasa putusan tersebut tidak adil, oleh karena itu termohon

Praperadilan (KPK) melakukan permohonan peninjauan kembali atas putusan praperadilan tersebut ke Mahkamah Agung.

Analisis

Permasalahan dalam kasus ini adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka dan penyitaan yang dilakukan oleh termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Merasa putusan tersebut tidak adil pihak termohon mengajukan permintaan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Untuk dapat menilai permintaan peninjauan kembali tersebut sudah tepat atau belum maka terlebih dahulu harus mengetahui apakah terhadap putusan praperadilan dapat dilakukan peninjauan kembali. Dalam KUHAP memang tidak diatur secara tegas larangan mengenai peninjauan kembali. KUHAP hanya mengatur upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan pada Pasal 83 ayat (2) KUHAP, tetapi Pasal 83 ayat (2) KUHAP telah dianulir oleh Putusan MK No: 65/PUU-XI/2011 sehingga terhadap putusan praperadilan tidak bisa diajukan upaya banding. Mengenai upaya hukum kasasi, Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengatur larangan perkara yang dapat diajukan permohonan kasasi termasuk perkara praperadilan, oleh karena itu perkara praperadilan tidak bisa

diajukan kasasi. Mengenai upaya hukum peninjauan kembali SEMA No: 8 Tahun 2011 mengatur larangan mengenai perkara yang tidak memenuhi syarat kasasi dan peninjauan kembali salah satunya adalah perkara praperadilan. Berdasarkan SEMA No: 8 Tahun 2011 maka perkara praperadilan tidak bisa diajukan peninjauan kembali. Tetapi Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No: 4 Tahun 2014 yang mengatur bahwa terhadap putusan praperadilan dapat diajukan peninjauan kembali dalam hal ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum. Penulis menilai dari sisi normatif argumentasi yang dilakukan pemohon PK sudah tepat. Pemohon mendalilkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 tanggal 1 Mei 2012 yang menganulir Pasal 83 ayat (2) KUHAP mengenai upaya hukum yang dapat dimintakan banding dan Pasal 45A ayat (1) juncto ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 mengenai Mahkamah Agung maka putusan praperadilan merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena tidak bisa lagi dilakukan upaya hukum banding dan kasasi, oleh karena itu upaya hukum yang bisa dilakukan hanyalah peninjauan kembali. Pihak pemohon PK juga mendalilkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dan keempat putusan Peninjauan Kembali perkara praperadilan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 87/PK/Pid/2013, Nomor:

18PK/Pid/2009, Nomor:
98/PK/Pid/2007, Nomor:
136/PK/Pid/2006 sebagai
Yurisprudensi sebagai dasar hukum
mengajukan permohonan
praperadilan. Penulis menilai
argumentasi tersebut sudah tepat,
karena pada praktiknya Mahkamah
Agung menerima sejumlah
permintaan peninjauan kembali
atas putusan praperadilan.
Penulis menilai dari sisi keadilan,
permohonan peninjauan kembali
terhadap putusan praperadilan oleh
KPK menekankan pada keadilan
substansif. Pemohon tidak hanya
menekankan pada keadilan
prosedural dengan membangun
argumentasi hukum secara
sistematis yuridis, tetapi juga
menekankan keadilan substansif,
bahwa putusan praperadilan dalam
kasus ini terindikasi
penyelundupan hukum (*law
smuggling/faus legis*) yang
dilakukan oleh hakim
praperadilan.

2) Putusan No: 12 PK/Pid/2011 (PK Ditolak)

Para Pihak

Presiden Republik Indonesia
Cq. Kepolisian Republik Indonesia
Cq. Kepolisian Daerah
Metropolitan Jakarta Cq.
Kepolisian Resort Metropolitan
Jakarta Pusat Cq. Kepolisian Sektor
Metropolitan Senen selaku
pemohon PK semula sebagai
termohon praperadilan Melawan
Winoto Mudjoputro selaku
termohon I PK semula sebagai
pemohon praperadilan dan
Presiden Republik Indonesia Cq.
Kejaksaan Agung Republik

Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai turut termohon peninjauan kembali dahulu sebagai termohon II praperadilan.

Kasus Posisi

Kasus ini berawal dari permohonan Winoto Mudjoputro sebagai pemohon praperadilan ke Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon praperadilan. Terhadap putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan termohon praperadilan tidak sah, termohon praperadilan Praperadilan melakukan upaya hukum banding. Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Nomor: 122/Pid/Prap/2010/PT.DKI dalam putusannya menguatkan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan termohon praperadilan tidak sah. Pihak termohon praperadilan/pembanding tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta oleh karena itu mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Analisis

Permasalahan kasus ini adalah putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa penghentian penyidikan oleh termohon praperadilan/pembanding tidak sah

dan putusan praperadilan tersebut dikuatkan oleh putusan banding Pengadilan Negeri Jakarta mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan. Merasa tidak adil terhadap putusan banding tersebut tersebut pihak termohon praperadilan/pembanding mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Untuk dapat menilai permintaan peninjauan kembali tersebut sudah tepat atau belum maka terlebih dahulu harus mengetahui apakah terhadap putusan praperadilan dapat dilakukan peninjauan kembali. Dalam KUHAP memang tidak diatur secara tegas larangan mengenai peninjauan kembali. KUHAP hanya mengatur upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan pada Pasal 83 ayat (2) KUHAP, tetapi Pasal 83 ayat (2) KUHAP telah dianulir oleh Putusan MK No: 65/PUU-XI/2011 sehingga terhadap putusan praperadilan tidak bisa diajukan upaya banding. Permohonan banding dalam kasus ini terjadi pada tahun 2010 sebelum dianulirnya Pasal 83 ayat (2) KUHAP oleh putusan MK. Mengenai upaya hukum kasasi, Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengatur larangan perkara yang dapat diajukan permohonan kasasi termasuk perkara praperadilan, oleh karena itu perkara praperadilan tidak bisa diajukan kasasi. Mengenai upaya hukum peninjauan kembali SEMA

No: 8 Tahun 2011 mengatur larangan mengenai perkara yang tidak memenuhi syarat kasasi dan peninjauan kembali, salah satunya adalah perkara praperadilan. Berdasarkan SEMA No: 8 Tahun 2011 maka perkara praperadilan tidak bisa diajukan peninjauan kembali. Tetapi Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No: 4 Tahun 2014 yang mengatur bahwa terhadap putusan praperadilan dapat diajukan peninjauan kembali dalam hal ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum. Penulis Menilai dari sisi normatif pertimbangan hakim tersebut sudah tepat. Pertimbangan berdasarkan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, terhadap putusan praperadilan mengenai tidak sahnya penghentian dapat diajukan banding. Serta Pasal 45A Undang-Undang NO: 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang NO: 5 Tahun 2004 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengenai perkara yang tidak bisa diajukan kasasi. Penulis menilai bahwa terhadap upaya hukum biasa banding dan kasasi, putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum oleh karena itu tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali. Permohonan PK dinilai cacat secara prosedur yang karena tidak ada dasar hukum dalam mengajukan PK perkara praperadilan.

Pada hakekatnya tujuan dari lembaga praperadilan untuk memberikan kekuatan kepada warga negara, untuk melawan aparat penegak hukum jika aparat penegak hukum melakukan tindakan yang merugikan warga. Dalam menjalankan tugasnya aparat penegak hukum dinilai sering merugikan warga negara ketika melakukan upaya paksa, oleh karena itu diajukan permohonan praperadilan. Praktiknya dalam praperadilan seringkali putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, sehingga perlu upaya hukum untuk menguji putusan tersebut. ini upaya hukum terhadap putusan praperadilan sudah tertutup. Upaya hukum banding tidak dapat dilakukan dengan dianulirnya Pasal 83 ayat (2) KUHAP tentang putusan praperadilan yang dapat diajukan banding oleh Putusan MK No: 65/PUU-XI/2011 karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Upaya hukum kasasi juga tidak dapat dilakukan Pasal 45A Undang-Undang NO: 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang NO: 5 Tahun 2004 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang larangan perkara yang dapat diajukan kasasi, salah satunya adalah perkara praperadilan. Mengenai upaya hukum peninjauan kembali Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA No: 8 Tahun 2011 tentang perkara yang tidak memenuhi syarat kasasi dan peninjauan kembali, akan tetapi Mahkamah Agung juga mengeluarkan SEMA No: 4 Tahun 2014 tentang terhadap putusan praperadilan dapat diajukan peninjauan kembali dalam hal ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat narasumber praktisi Yudi Kristiana, S.H., M.Hum. KALITBANG Kejaksaan Agung Republik Indonesia “upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan praperadilan hanya peninjauan kembali berdasarkan

SEMA No: 4 Tahun 2014 jika dalam kasus terdapat penyelundupan hukum”²². Dengan adanya SEMA No: 4 Tahun 2014 membuka celah untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Menurut penulis untuk mengatur upaya hukum terhadap putusan praperadilan secara jelas dan tegas, upaya hukum yang tepat adalah banding. Penulis berpendapat karena dalam upaya hukum banding dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan apabila terdapat hal-hal yang kurang lengkap dalam persidangan tingkat pertama. Selain itu kurang tepat jika upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali, karena beban perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung.

4. KESIMPULAN

Argumentasi para pihak dalam praktek pengajuan upaya hukum terhadap putusan praperadilan di Indonesia berbeda-beda. Mulai dari upaya hukum biasa yaitu pemeriksaan banding dan kasasi serta upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal tersebut dikarenakan aturan hukum praperadilan khususnya mengenai upaya hukum terhadap putusan praperadilan belum diatur secara jelas dan sistematis. Sehingga argumentasi para pihak berbeda-beda dalam mengajukan upaya hukum dan berakibat disparitas putusan praperadilan. Formulasi yang tepat untuk mewujudkan payung hukum terhadap putusan praperadilan; dalam jangka pendek Mahkamah Agung harus mengeluarkan aturan mengenai upaya hukum bagi putusan praperadilan agar terdapat pedoman bagi para pihak dalam melakukan upaya hukum dan dalam jangka panjang dengan reformulasi KUHAP khususnya mengenai lembaga praperadilan sehingga terwujud aturan yang

jelas dan sistematis dalam mewujudkan payung hukum terhadap putusan praperadilan.

5. REFERENSI

Afiah, Ratna Nurul, 1985, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Presindo, Jakarta

Bemmelen, J.M. van., 1950, *Strafvordering Leerboek van het Ned, Strafprocesrecht*, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff

Loqman, Loebby, 1984, *Pra Peradilan Di Indonesia*, GI, Jakarta.

Tanubroto S., 1983, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.

Yahya Harahap, M., 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Claudia Okta Rini, 2011, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Atas Alasan Penghentian Penyidikan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 83 Ayat (2) KUHAP (Studi Kasus Penerimaan Permintaan Banding Dalam Kasus Lam Yenny Lamengan VS Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Indonesia Depok.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang

²² Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Yudi Kristiana, di Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, S.H., M.H., Pada tanggal 21 Maret 2016, pukul 20:00, Jakarta

Hukum Acara Pidana.
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor
49. Sekretariat
Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung.
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 73
Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun
2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 Tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor
290. Sekretariat Negara. Jakarta.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor
4 Tahun 2014 Tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung Tahun 2013 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagi Pengadilan. Mahkamah
Agung Republik Indonesia
Tahun 2014. Jakarta.

<http://nasional.sindonews.com/read/1045381/13/kpk-optimis-ma-terimapk-putusan-praperadilan-hadi-poernomo1442387778>,
diakses 1 Maret 2016.